

tahun. PKB belum mencoba untuk memagangkan tenaga yang baru pada PIK-KRR yang sudah masuk katagori tegar. Hal ini juga mempengaruhi proses penyampaian informasi tentang TRIAD KRR.

Berdasarkan data dari BPPKB Kabupaten Jember masalah sumber daya manusia terkait dengan tenaga terlatih PIK-KRR yang berasal dari pendidik sebaya terlatih berjumlah 92 orang, konselor sebaya terlatih 43 orang dan ketua PIK-KRR terlatih 34 orang. Persentase antara jumlah remaja dengan pendidik dan konselor sebaya yang ada rendah. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan dan pengelolaan program PIK-KRR

Dikatakan juga oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) bahwa dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan PIK-KRR di wilayah dilakukan oleh PKB, tetapi berdasarkan wawancara dengan 5 orang PKB pada masing-masing PIK berbeda, 1 orang yang rutin melakukan pengawasan kegiatan dan pembinaan tiap bulan bahkan sering mendampingi remaja saat memberikan informasi KRR, 2 orang mengatakan melakukan pembinaan tetapi tidak pernah mendampingi kegiatan remaja, 2 orang mengatakan tidak tentu kadang 2 bulan sekali melakukan pengawasan dan pembinaan.

Faktor penunjang pelaksanaan program PIK-KRR lainnya adalah penyediaan sarana dan fasilitas untuk kegiatan PIK-KRR dilapangan. Di Kabupaten Jember alat bantu untuk promosi dan sosialisasi menggunakan lembar balik dan alat peraga. Tetapi alat bantu yang digunakan untuk kegiatan belum semua PIK yang ada di Kecamatan memiliki sendiri dan masih meminjam pada Puskesmas atau PIK-KRR yang lain. Sedangkan dari BPPKB hanya memberikan materi bahan bacaan. Seharusnya masing-masing PIK-KRR memiliki sarana dan fasilitas secara lengkap, dan fasilitas yang ada harus cukup mendukung kebutuhan remaja “ *Youth Friendly* ”.⁹

Berdasarkan wawancara dengan pengelola program (Kepala Bidang) yang membawahi KB/KRR pada BPPKB Kabupaten Jember dikatakan bahwa di Kabupaten

Jember sudah ada dukungan kebijakan dari Bupati Jember dalam bentuk Surat Keputusan tentang PIK-KRR yang tidak lanjut oleh Camat dengan menerbitkan SK untuk PIK-KRR yang ada di wilayah Kecamatan. Sedangkan dana untuk pelaksanaan kegiatan PIK-KRR didapat dari Provinsi dan dari APBD yang menjadi satu dengan dana untuk kegiatan Keluarga Berencana. Dalam pendistribusiannya diterimakan ke Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) dalam hal ini Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Dana yang ada hanya untuk PIK-KRR yang sudah dalam katagori tegar, sedangkan yang masih dalam katagori tumbuh dan tegak menjadi tanggung jawab kecamatan.

Adapun PIK-KRR yang ada di wilayah Kabupaten Jember, kerja sama lintas program yang sudah terjalin dengan petugas kesehatan di Puskesmas wilayah Kecamatan sebagai tempat rujukan remaja bermasalah.

Keberadaan dan peranan PIK-KRR di lingkungan remaja sangat membantu remaja untuk mendapatkan informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang KRR. Sehingga apabila PIK-KRR ini dalam pelaksanaannya dikelola dengan baik dapat menurunkan permasalahan KRR. Dari uraian beberapa hal tersebut diatas terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program PIK-KRR sebagai program KRR. Dimana di Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program PIK-KRR belum sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Hal penting dalam pelaksanaan yaitu pemberdayaan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya yang jauh dari